

Judul : Pemangkasan anggaran hukum, koruptor senang, DPR juga ikut senang
Tanggal : Selasa, 13 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Pemangkasan Anggaran Hukum Koruptor Senang, DPR Juga Ikut Senang

CENTER for Budget Analysis (CBA) menilai, terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga bakal menguntungkan para koruptor.

Alasannya, sejumlah lembaga penegak hukum mengalami pemangkasan anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada penegakan hukum, khususnya kasus-kasus korupsi.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi menyebutkan, Inpres 8/2016 ini berwujud "sadis" karena mengamputasi anggaran penegakan hukum atau lembaga-lembaga yang bekerja di wilayah hukum.

Besaran pemangkasan anggaran tersebut mencapai Rp 3,751 triliun yang berasal dari 8 lembaga yaitu Polri, Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan PPATK.

Dia menuturkan, pemangkasan anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum akan berakibat kepada hilangnya rasa aman dan keadilan di masyarakat. Sementara pihak lain seperti para koruptor akan diuntungkan karena sekarang penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan PPATK bakal kekurangan anggaran.

"Bisa jadi aparat penegakan hukum tersebut akan mandul lantaran minimnya anggaran untuk membongkar kejahatan korupsi," ujarnya di Jakarta,

kemarin.

CBA menyatakan kecewa dengan sikap DPR yang tidak melakukan penolakan terhadap pemangkasan anggaran lewat Inpres 8/2016 tersebut. Padahal, DPR memiliki hak budget dan kewenangan pengawasan. "Bahkan sampai saat ini, DPR hanya bisa diam dan minim melakukan protes atas amputasi anggaran ini," kritiknya.

Di samping itu, pemangkasan anggaran tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari anggota dewan. Uchok menduga anggota DPR senang dengan pemangkasan anggaran tersebut.

"Mungkin mereka gembira sekali dengan amputasi anggaran KPK dan PPATK, dan sekarang mereka akan lebih leluasa main proyek-proyek APBN tanpa khawatir disadap oleh KPK," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian dan Lembaga (K/L) menghemat anggaran belanja. Kebijakan ini dituangkan dalam Inpres No 8/2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Total penghematan itu mencapai Rp 64,7 triliun dari 83 K/L. Sasaran penghematan meliputi belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, dan iklan. ■ OSP